

PERAN ALOKASI ANGGARAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN UMKM SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN NAGEKEO

The Role of Regional Budget Allocatin in Supporting the Sustainable Development of Micro Small and Medium Enterprises (Msmes) in Nagekeo Regency

Verena N. Dhema^{1,a)}, Aldarine Molidya^{2,b)}, Hasmarini A. Waruwu^{3,c)}

^{1,2,3})Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia Indonesia

Koresponden : ^{a)} ernanenu@gmail.com , ^{b)} aldarine.molidya@staf.undana.ac.id

^{c)} hasmarini.waruwu@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran alokasi anggaran daerah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan di Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran daerah telah diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui program fasilitasi usaha mikro, pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas produksi dan SDM. Namun efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan besaran anggaran, belum optimalnya integrasi program lintas perangkat daerah, serta belum meratanya kapasitas akses pelaku UMKM terhadap fasilitas pemerintah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah memiliki peran strategis dalam penguatan UMKM, namun untuk mendorong pengembangan yang berkelanjutan, diperlukan konsistensi penganggaran, penguatan koordinasi antarinstansi, dan perluasan program yang secara eksplisit mendukung digitalisasi, inovasi, dan peningkatan daya saing UMKM lokal.

Kata Kunci : Alokasi Anggaran Daerah, Pembangunan Daerah, UMKM, Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional sebagai suatu bentuk menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan berbagai sektor, salah satunya pengembangan sektor ekonomi. Indikasi tercapainya suatu pembangunan ekonomi yaitu dari peningkatan segi perekonomian, kesempatan kerja yang luas, minimnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan melalui konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, bahkan sebagai pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki baik satu orang maupun kelompok sesuai dengan peraturan undang-undang (Sumadi & Prathama, 2021). UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja,

maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (Jefri & Ibrohim, 2021). UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97,1% dari seluruh tenaga kerja dan sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar, yaitu 61,1% (Bank Indonesia). Selain itu, keberadaan UMKM memberikan peluang usaha dan pendapatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dapat diolah menjadi produk-produk unggulan. Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha, seperti akses terhadap modal, keterbatasan pengetahuan teknologi, akses pasar yang terbatas, terbatasnya kapasitas SDM serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Tantangan-tantangan ini menghambat kemampuan UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi tantangan ini melalui alokasi anggaran daerah yang tepat guna mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan UMKM, namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai persoalan kebijakan terkait alokasi anggaran pengembangan UMKM, terutama pada aspek ketepatan perencanaan dan penentuan prioritas program.

Penyusunan anggaran yang idealnya berbasis data, kebutuhan sektor, dan evaluasi capaian kinerja sebelumnya, belum sepenuhnya ditopang oleh pemetaan menyeluruh mengenai kondisi dan kebutuhan UMKM di daerah. Selain itu, penetapan program dan besaran anggaran cenderung lebih menekankan kelengkapan prosedural administratif daripada relevansi substansi, sehingga kegiatan yang dirancang belum mampu menjawab masalah inti yang dihadapi pelaku usaha. Pada tahap implementasi, masih terlihat adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, koordinasi antar-OPD yang belum optimal, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Kondisi ini menyebabkan intervensi anggaran belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing UMKM, serta belum mampu membentuk ekosistem pembinaan yang berkelanjutan di Kabupaten Nagekeo.

KAJIAN TEORI

Teori Ekonomi Pembangunan

Menurut Todaro & Smith, (2020) sebagaimana tercermin dalam bukunya "*Economic Development*," bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, institusi, politik, dan ekonomi. Pembangunan tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi yang diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita. Todaro menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, dan pengangguran. Proses ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terencana dengan melibatkan peran aktif pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar dan mendorong perubahan struktural.

Ekonomi pembangunan menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam

kebijakan pembangunan adalah alokasi anggaran daerah, yang berperan dalam meningkatkan daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut teori Pertumbuhan Endogen (Romer & Lucas), investasi dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan inovasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang (Febriansah, 2021)

Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad memberikan pengertian pembangunan daerah adalah “sebagai proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kementrian antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*Endogenous*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal/daerah (Windusancono, 2021).

Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat dua definisi pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan oleh Suparmoko Muhammad, dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah”. yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (didefinisikan sebagai kuat) dan berkelanjutan dalam arti lemah (didefinisikan sebagai lemah); pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat membutuhkan nilai dari semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia, nilai ekosistem sebagai modal alam, dan nilai modal buatan manusia yang tidak berubah atau tetap konstan. Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Indrianti, 2022).

Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publiknya. Keuangan publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efektivitas anggaran, dan bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Keuangan publik menjadi acuan bagaimana pemerintah melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan segala pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan tugas.

Musgrave menekankan analisis bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya dan merespon kebutuhan sosial. Musgrave mencatat bahwa sejak *Great Depression*, teori keuangan publik didominasi oleh efek kebijakan fiskal pemerintah terkait *level income*, ketenagakerjaan, dan harga (Biswan, 2022). Dalam konteks UMKM, teori ini relevan untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal, khususnya anggaran daerah, dapat mendukung pengembangan UMKM melalui subsidi, bantuan modal, pelatihan, dan infrastruktur.

Kerangka Berpikir



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam peran alokasi anggaran daerah dalam pengembangan UMKM. Metode ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan pandangan para pelaku UMKM dan pihak pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu menentukan narasumber yang dianggap paling mengetahui proses penganggaran dan pelaksanaan program UMKM. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti memahami konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas alokasi anggaran secara lebih mendalam. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif

bertujuan menangkap makna dan pengalaman partisipan secara langsung melalui interaksi yang intensif dalam konteks alami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Dan Perencanaan Anggaran Daerah Untuk Pengembangan UMKM

Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan dan perencanaan anggaran untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Nagekeo telah disusun secara formal dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, yang mengacu pada regulasi nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri yang mengharuskan pemerintah daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, sektor UMKM telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Sesuai dengan pandangan Arsyad dalam Windusancono (2021), pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan dengan mengelola sumber daya lokal melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Proses penyusunan anggaran pengembangan UMKM di Kabupaten Nagekeo dilakukan secara partisipatif dan terstruktur dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang menjadi forum penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaku UMKM dengan memperhatikan kriteria utama yang digunakan antara lain: Urgensi kebutuhan pelaku UMKM, Dampak ekonomi yang dihasilkan, Keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah, Ketersediaan dan efisiensi anggaran, Kestinambungan program dari tahun sebelumnya, Potensi sektor unggulan lokal. Namun realisasi program UMKM kerap kali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan adanya kompetisi dengan sektor pembangunan lainnya yang dianggap lebih strategis oleh pemangku kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan yang pro-UMKM dengan keputusan anggaran yang tidak selalu berpihak pada pengembangan sektor tersebut. Padahal, menurut Musgrave dalam teori keuangan publik, anggaran pemerintah seharusnya menjadi instrumen penting dalam alokasi sumber daya publik yang mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat, terutama sektor-sektor yang tidak mampu berkembang melalui mekanisme pasar (Biswan, 2022).

Situasi ini juga selaras dengan temuan Nurwaesari dan Mangkurat (2022) yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor UMKM, terutama di masa krisis, sangat dipengaruhi oleh dinamika politik antara eksekutif dan legislatif, yang kemudian berdampak pada tidak meratanya program pemulihan UMKM. Selain itu, penelitian oleh MUK'MIN (2023) juga mengungkap bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM seringkali belum optimal akibat rendahnya perhatian terhadap penyusunan anggaran yang berpihak pada kebutuhan aktual pelaku usaha.

Implementasi Alokasi Anggaran

Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi alokasi anggaran untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Nagekeo tidak dilakukan melalui mekanisme pemberian dana tunai langsung kepada pelaku usaha, melainkan dalam bentuk program kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha secara menyeluruh. Bentuk program yang dilaksanakan

mencakup pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, fasilitasi perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, bantuan alat produksi, promosi dan pemasaran, serta pendampingan usaha. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad Kurniati dkk., (2024), intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan berbasis program dan pelatihan dinilai lebih efektif untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh. Strategi pembangunan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pasar, serta teknologi dan inovasi adalah fondasi utama untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing.

Dalam hal distribusi anggaran, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa alokasi dana tidak dibagi secara merata, tetapi berdasarkan pertimbangan kebutuhan nyata, urgensi program, jumlah pelaku UMKM yang menjadi sasaran, serta potensi dampak ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diuraikan dalam teori keuangan publik oleh Musgrave, di mana anggaran publik seharusnya dialokasikan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial terbesar (Biswan, 2022). Namun demikian, implementasi program di lapangan tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya legalitas formal pelaku UMKM, keterbatasan literasi digital dan keuangan, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan yang telah diselenggarakan. Selain itu, meskipun sejumlah pelaku telah mengikuti pelatihan, hanya sebagian dari mereka yang mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam praktik usaha sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan satu arah melalui pelatihan saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan pendampingan intensif dan dukungan ekosistem yang berkelanjutan.

Kondisi ini selaras dengan temuan Hartanti (2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program, tetapi juga oleh kesiapan pelaku usaha dalam menerima dan memanfaatkan intervensi tersebut. Begitu pula dengan hasil penelitian Sumadi & Prathama (2021) yang menyatakan bahwa peran fasilitator, regulator, dan katalisator pemerintah harus berjalan simultan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan berdampak nyata terhadap pengembangan UMKM. Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam mengalokasikan anggaran dan merancang program yang menysasar kebutuhan pelaku UMKM, efektivitas implementasi masih bergantung pada kesiapan pelaku, dukungan kebijakan yang konsisten, serta keberlanjutan program di luar tahun anggaran berjalan.

Keberlanjutan Program dan Dampak Anggaran terhadap UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperindag dan UKM, diketahui bahwa pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memastikan bahwa program tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan dan kemandirian pelaku UMKM. Upaya ini dilakukan melalui penguatan aspek produksi, peningkatan akses pasar, dan pemberdayaan pelaku usaha secara menyeluruh. Komitmen tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Suparmoko (2023), yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi daerah harus mampu mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan, dengan memperhatikan kapasitas lokal dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perubahan secara mandiri.

Dalam konteks ini, pengembangan UMKM yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi oleh seberapa kuat pelaku usaha mampu bertahan dan tumbuh tanpa ketergantungan pada bantuan langsung pemerintah. Selanjutnya, dalam proses pengelolaan anggaran untuk program pengembangan UMKM, pemerintah daerah tidak hanya mengukur keberhasilan dari aspek serapan anggaran, tetapi juga menggunakan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan program dan kegiatan. Indikator tersebut mencakup aspek kuantitatif seperti peningkatan omzet, perluasan akses pasar, dan jumlah pelaku usaha yang mampu mandiri secara finansial pasca intervensi, serta aspek kualitatif seperti peningkatan kapasitas manajerial, pembentukan jejaring usaha, dan konsistensi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Di Kabupaten Nagekeo, evaluasi program dilakukan secara periodik melalui monitoring lapangan, laporan kinerja bidang teknis, serta forum evaluasi triwulanan dan tahunan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan maupun penyesuaian alokasi anggaran di tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartanti & Hendratmoko (2021) yang menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pelaksanaan program UMKM, yang tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan awal, tetapi harus disertai dengan monitoring, evaluasi, dan peningkatan kapasitas pelaku secara berkelanjutan. Penelitian lain oleh Muk'min (2023) juga menyatakan bahwa indikator keberhasilan program UMKM seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa banyak pelatihan atau bantuan yang diberikan, tetapi dari sejauh mana pelaku usaha mampu bertahan, berkembang, dan membentuk jaringan usaha baru pasca program. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi yang diterapkan di Kabupaten Nagekeo yang bersifat menyeluruh dan adaptif menunjukkan langkah progresif dalam menciptakan sistem pengembangan UMKM yang lebih terukur dan berdampak nyata. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang sistematis dan indikator keberlanjutan yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar kuat untuk memperbaiki kebijakan serta memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi struktur ekonomi lokal.

Persepsi dan Pengalaman Pelaku UMKM terhadap Program dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelaku UMKM mengetahui keberadaan program bantuan yang didanai oleh anggaran daerah melalui jalur informasi informal, seperti kelompok usaha, perangkat desa, serta kegiatan sosialisasi dari dinas terkait. Jalur ini cukup efektif dalam menjangkau pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas atau kelompok binaan. Namun demikian, informasi tersebut belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata. Beberapa di antaranya mengaku tidak menerima informasi secara tepat waktu atau menghadapi kendala administratif, seperti tidak memiliki surat izin usaha yang menjadi syarat utama untuk memperoleh bantuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun program telah dirancang secara inklusif, aksesibilitasnya masih terbatas dan cenderung selektif, terutama bagi pelaku usaha yang belum terorganisasi secara formal.

Program-program yang telah dilaksanakan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, promosi produk melalui pameran, serta fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), dinilai memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM. Para pelaku usaha menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mampu meningkatkan keterampilan, efisiensi operasional, serta daya saing produk mereka. Sebagai contoh, pelaku usaha makanan menyatakan bahwa bantuan alat

dapur yang diberikan pemerintah mampu meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat pelayanan, dan menjaga kualitas serta kebersihan makanan. Temuan ini memperkuat teori ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2020), yang menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia dan intervensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha mikro secara langsung.

Meskipun demikian, dalam hal efektivitas pelaksanaan program, pelaku UMKM menyampaikan bahwa kebermanfaatan program masih terbatas akibat kurangnya keberlanjutan program dan minimnya pendampingan setelah kegiatan dilaksanakan. Program pelatihan, misalnya, umumnya hanya dilakukan satu kali tanpa adanya upaya monitoring, evaluasi, maupun pendampingan jangka panjang. Akibatnya, manfaat yang diperoleh dari pelatihan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh peserta. Selain itu, jumlah penerima manfaat juga dinilai masih terbatas, sehingga belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Murni & Humaira (2021) yang menyatakan bahwa meskipun program bantuan UMKM dari pemerintah dirancang dengan baik, pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi pelaku usaha, disebabkan oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan waktu, serta kurangnya sumber daya. Penelitian serupa oleh Nurwaesari & Mangkurat (2022) juga mengungkap bahwa persepsi positif terhadap program sangat dipengaruhi oleh keterjangkauan, keberlanjutan pelaksanaan program, serta adanya tindak lanjut pasca intervensi.

PENUTUP

Kesimpulan

Alokasi anggaran daerah Kabupaten Nagekeo memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan yang meliputi pelatihan, fasilitasi perizinan, bantuan alat produksi, serta dukungan pemasaran untuk meningkatkan kapasitas usaha. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih terbatas akibat minimnya anggaran yang tersedia dan belum meratanya distribusi program sehingga tidak semua pelaku UMKM memperoleh manfaat secara adil. Pendampingan yang kurang berkelanjutan juga menghambat penerapan pengetahuan dan keterampilan baru oleh pelaku usaha setelah mengikuti pelatihan. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung UMKM, namun koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat agar program dapat lebih tepat sasaran. Evaluasi program pun belum sepenuhnya menekankan pada hasil dan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha. Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM telah merasakan peningkatan keterampilan, kapasitas produksi, dan peluang pasar dari program yang diberikan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas implementasi kebijakan ke depan. Untuk mewujudkan pengembangan UMKM yang berkelanjutan, diperlukan penganggaran yang lebih konsisten serta pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan. Penguatan pendampingan, keterbukaan informasi, dan pemerataan akses program menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Dengan demikian, alokasi anggaran daerah akan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi penguatan ekonomi lokal di Kabupaten Nagekeo.

Saran

Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo perlu menjadikan sektor UMKM sebagai prioritas strategis dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Diperlukan mekanisme implementasi yang lebih adaptif, dengan memperkuat sistem pendampingan berkelanjutan, keterbukaan informasi mengenai program bantuan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan aktual pelaku UMKM di lapangan. Evaluasi kinerja program juga perlu diperkuat, tidak hanya pada serapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan dampaknya terhadap kemandirian dan keberlanjutan usaha.

Bagi Pelaku UMKM diharapkan lebih aktif dalam mengakses informasi terkait program pemerintah serta memanfaatkan secara maksimal berbagai fasilitas yang telah disediakan, seperti pelatihan, fasilitasi perizinan, dan bantuan alat produksi. Meningkatkan legalitas usaha dan kapasitas manajerial serta mulai membangun jaringan usaha dan memperkuat literasi digital maupun keuangan agar mampu bersaing dan berkembang secara mandiri dalam ekosistem ekonomi yang semakin kompetitif.

Bagi Penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek efektivitas program berdasarkan jenis intervensi anggaran, serta melakukan analisis komparatif antar daerah untuk melihat praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran pengembangan UMKM. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih terperinci dampak anggaran terhadap indikator pertumbuhan usaha, seperti omzet, jumlah tenaga kerja, dan perluasan pasar, serta menelusuri peran stakeholder lain di luar pemerintah dalam mendukung ekosistem UMKM yang berkelanjutan

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincolin. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Biswan, A. T. (2022). *Keuangan Publik: Teori dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik*. Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN. ISBN 978-623-6784-38-9
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Febriansah, R. E. (2021). Buku Ajar Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan. In *Buku Ajar Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-76-8>
- Hartanti, W. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 4(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v4i1.3952>
- Indrianti, N. (2022). Menjaga Kesehatan Lansia Untuk Mendukung Pembangunan

Berkelanjutan. *LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta*, 4.

- Jefri, U., & Ibrohim, I. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.730>
- Kurniati, E., Supriyaningsih, O., Andini, D. T., Lestari, E. D., & Prameswari, S. P. (2024). *The Role Of Government In Regional Economic*. November, 6064–6076.
- MUK'MIN, A. (2023). peran pemerintah daerah dalam Pengembangan Umkm Sektor Pertanian Dan Peternakan Di Kabupaten Sidenreng Rappang". *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Sumadi, M. F., & Prathama, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) "Handycraft" Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2322. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition).
- Windusancono, B. A. (2021). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(1), 89. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2170>